

## PENDIDIKAN FORMAL SEBAGAI PELESTARI TATA-NILAI DAN PEMBARU KEBUDAYAAN

---

*Ali Rohmad\**

---

*\*IAIN Tulungagung Fak. Tarbiyah  
damhorila@yahoo.co.id*

### *Abstract*

*In the Islamic perspective, receptive functions that must be carried by each unit of formal education can be identified with the task of developing of **habl min Allāh** (حبل من الله) the fabric of human relationship with God, is also the duty of man as a servant of God (عبدالله) the human self servitude to Allah; being directive functions that must be carried by each educational unit can be identified with the task of developing of **habl min al-Nas** (حبل من الناس) the fabric of the relationship between humans and their universe, is also the duty of man as caliph of God on earth ( خليفة الله في الأرض) that prosperity world.*

**Kata Kunci :** Pendidikan, Tata Nilai, Kebudayaan.

### **Pendahuluan**

Bagi seluruh masyarakat, bangsa, dan negara yang ada di muka bumi, jalur pendidikan formal dapat dipandang sebagai bagian dari kebudayaan masing-masing.<sup>1</sup> Secara idealitas, jajaran pengelola

---

<sup>1</sup>Mengenai jalur pendidikan formal di Indonesia saat ini, termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 14 : “Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”, Pasal 15 : “Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan khusus”. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdapat sekolah dan madrasah; vide Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru pada Pasal 1 angka 13 sampai dengan angka 22. Untuk memahami sejarah sekolah dan madrasah, vide, Haidar Putra

pendidikan formal tersebut dibebani dua macam tanggung jawab kebudayaan. *Pertama*, jajaran pengelola pendidikan formal harus bertanggung jawab mentransformasikan tata-nilai yang menjadi anutan bagi perilaku generasi tua terhadap para pelajar selaku generasi muda melalui aktivitas pembelajaran agar nilai-nilai tersebut lestari. *Kedua*, jajaran pengelola pendidikan formal harus bertanggung jawab mengembangkan potensi-potensi sumber daya manusia para pelajar agar di masa datang memiliki kesiapan menjadi generasi penerus yang memperjuangkan aktualisasi cita-cita masyarakat, bangsa, dan negaranya sehingga terjadi pembaruan kebudayaan yang berkeadaban lagi dinamik sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

Secara realitas, dalam kehidupan sehari-hari terdapat fenomena yang kontradiktif atas kemampuan jajaran pengelola pendidikan formal dalam mengemban tanggung jawab tersebut. Pada satu sisi, terdapat jajaran pengelola pendidikan formal yang memposisikan diri sebagai pengemban amanat sebagai pelestari tata-nilai dan pembaru kebudayaan secara berimbang; berhasil dengan baik membelajarkan nilai-nilai sekaligus berhasil mengembangkan potensi sumber daya manusia para pelajar yang sesuai dengan tuntutan zaman. Pada lain sisi, terdapat jajaran pengelola pendidikan formal yang mengemban amanat sebagai pelestari nilai-nilai dan pembaru kebudayaan secara tidak berimbang di kalangan pelajar. Mungkin, berhasil membelajarkan nilai-nilai terhadap para pelajar, tetapi gagal mempersiapkan para pelajar sebagai pembaru kebudayaan. Atau mungkin, gagal membelajarkan nilai-nilai terhadap para pelajar, tetapi berhasil mempersiapkan para pelajar sebagai pembaru kebudayaan. Dan yang terjelek, adalah yang gagal membelajarkan nilai-nilai terhadap para pelajar dan gagal mempersiapkan para pelajar menjadi pembaru kebudayaan.

Dipandang dari sudut akademik, perbedaan antara idealitas dengan realitas di atas memiliki keunikan dan kemenarikan untuk didiskusikan lebih lanjut agar dapat diidentifikasi pendorong keberhasilan dan atau kegagalan jajaran pengelola pendidikan formal mengemban tanggung jawabnya. Lebih lanjut, agar keberhasilan jajaran pengelolaan jalur pendidikan formal mengemban amanat tersebut di masa mendatang dapat makin dimaksimalkan dan kegagalan mengemban amanat tersebut dapat dieliminir sedemikian rupa. Ini bukan khayalan, jika mengingat bahwa “sejarah peradaban manusia menunjukkan bahwa masyarakat atau bangsa selalu

---

Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah*, 1<sup>st</sup> ed, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001; Maksum, *Madrasah Sejarah & Perkembangannya*, 1<sup>st</sup> ed, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999)

menggunakan sistem pendidikan sebagai instrumen untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Kelangsungan hidup bangsa sedikit banyak tergantung kepada tepat tidaknya sistem pendidikan, khususnya pendidikan persekolahan, yang dimilikinya”.<sup>2</sup>

Pemikiran di atas menarik perhatian sekaligus memotivasi penulis untuk menulis artikel dan menyajikannya dalam jurnal ilmiah ini.

## Pembahasan

### 1. Manusia dan kebudayaan

Definisi kebudayaan (culture, tsaqafah) telah banyak dirumuskan oleh para ahli. Mengingat, para ahli mendefinisikan kebudayaan itu menurut visi mereka masing-masing, bisa jadi jumlah definisi yang telah dirumuskan itu lebih banyak daripada jumlah mereka, dengan versi definisi kebudayaan yang beraneka ragam sekali.<sup>3</sup> Dan setelah menelaah banyak definisi kebudayaan yang dibuat para ahli dengan segala visi dan variasinya, Endang Saifuddin Anshari mendefinisikan kebudayaan sebagai berikut:

Kebudayaan (kultur) adalah hasil karya-cipta (pengolahan, pengerahan, dan pengarahan terhadap alam oleh) manusia dengan kekuatan jiwa (pikiran, perasaan, kemauan, intuisi, imajinasi, dan fakultas-fakultas rohaniah lainnya) dan raganya, yang menyatakan diri dalam pelbagai kehidupan (hidup rohaniah) dan penghidupan (hidup jasmaniah) manusia, sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntutan dan dorongan dari intra diri manusia dan ekstra diri manusia, menuju ke arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan (spiritual dan material) manusia, baik individu maupun masyarakat.<sup>4</sup>

Mencermati definisi kebudayaan yang dirumuskan oleh Endang Saifuddin Anshari tersebut dapat diketahui, bahwa :

---

<sup>2</sup>St. Vembriarto, *Kapita Selekta Pendidikat*, vol.2 (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 99.

<sup>3</sup>Vide, Faisal Ismail, *Agama dan Kebudayaan*, 1<sup>st</sup> ed, (Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1982), hlm.7-14; Muhaimin,et.al, *Dimensi-Dimensi Studi Islam*, 1<sup>st</sup> ed. (Surabaya: Karya Abditama,1994), hlm. 306-307; Maman Abdurrahman, *Ilmu Sosial Dasar*, 1<sup>st</sup> ed. (Bandung: Calvary, 1987), hlm. 56; Ali Saifullah, *Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 24-29.

<sup>4</sup>Endang Saifuddin Anshari, *Agama dan Kebudayaan* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980), hlm. 32.

- a. Kebudayaan itu ciptaan manusia.
- b. Bahan kebudayaan adalah alam yang berasal dari dalam/luar diri manusia.
- c. Alat penciptaan kebudayaan adalah jiwa dan raga manusia.
- d. Secara global kebudayaan bisa dibedakan atas kebudayaan immateri (rohaniah) dan materi (jasmaniah).
- e. Kebudayaan merupakan respon manusia atas tantangan, tuntutan dan dorongan intra dan ekstra dirinya.
- f. Tujuan kebudayaan adalah untuk kesempurnaan dan kesejahteraan manusia individu dan/atau masyarakat.
- g. Kebudayaan bisa diwariskan dan diwarisi melalui pendidikan.

Karena manusia dikaruniai daya cipta yang bisa terus menerus berkembang, maka ciptaan manusia yang dinamai kebudayaan itu memiliki sifat, corak, ragam, yang amat luas dan kompleks. Kebudayaan itu menurut Koentjoroningrat,<sup>5</sup> paling sedikit mempunyai tiga wujud :

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan, dan sebagainya.
- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari aktivitas, kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Manusia dan kebudayaan merupakan suatu jalinan yang saling berkaitan erat.<sup>6</sup> Kebudayaan tidak akan pernah ada tanpa manusia, dan tidak ada satu kelompok manusia, meski hidup terasing dan bersahaja, yang tidak memiliki kebudayaan. Setiap kelompok manusia pasti memiliki kebudayaan, yang berbeda hanyalah corak dan taraf kebudayaannya selaras dengan perkembangan zaman.

## 2. Islam dan kebudayaan

Di dalam Islam, manusia dinyatakan sebagai makhluk yang merdeka dan menduduki posisi yang terhormat. Oleh

---

<sup>5</sup>Vide, Koentjoroningrat, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, 3<sup>rd</sup> ed (Jakarta: PT. Gramedia, 1976), hlm. 15.

<sup>6</sup>Vide, Sidi Gazalba, *Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu*, vol. 2, 3<sup>rd</sup> ed (Jakarta: Pustaka Antara, 1967), hlm. 106-108.

Islam, manusia dituntut untuk menemukan esensi dirinya, memikirkan kedudukannya dalam struktur realitas, supaya ia mampu menempatkan diri pada posisi sebagai hamba Allah swt dan sebagai khalifahNya di muka bumi. Khalifah Allah swt ini merupakan predikat dan sekaligus merupakan pendelegasian tugas pada manusia untuk menciptakan kemakmuran di muka bumi, bukan untuk merusak/menghancurkannya. Dan untuk mengaktualisasikan tugas tersebut, Islam telah memotivasi/memerintah para pemeluknya menciptakan kebudayaan dalam berbagai wujudnya, dan inilah yang dinamai dengan kebudayaan Islam.<sup>7</sup>

Setelah mencermati definisi kebudayaan yang dibuat Endang Saifuddin Anshari di atas, sampailah pada pengertian bahwa sebagai agama samawiy (agama wahyu, revealed religion), Islam bukan merupakan unsur dari kebudayaan Islam, dan kebudayaan Islam bukan pula unsur dari Islam, masing-masing berdiri sendiri sekalipun terdapat hubungan yang amat erat antara keduanya. Terhadap hubungan Islam dengan kebudayaan Islam ini, Faisal Ismail menegaskan bahwa : “...Islam merupakan dasar, asas, pengendali, pemberi arah dan sekaligus merupakan sumber nilai-nilai kultural. Agama (Islam)lah yang menjadi pengawal budaya, sehingga ia menjadi kebudayaan yang bercorak dan beridentitas Islam”.<sup>8</sup>

Dengan ungkapan lain dapat dikatakan, bahwa Islam merupakan sumber, jiwa, dan nafas bagi kebudayaan Islam, karena tanpa ada Islam tentu tidak akan ada kebudayaan Islam. Ini memberi pemahaman bahwa tumbuh berkembangnya kebudayaan Islam itu bukan bebas nilai (*value-free*), melainkan justru terikat oleh nilai (*value-bound*) baik nilai-nilai ilaahiyah maupun nilai-nilai insaaniyah.<sup>9</sup>

### 3. Pendidikan formal dan kebudayaan

Pendidikan formal selalu dalam keadaan berubah sesuai dengan perkembangan kebudayaan. Pendidikan formal

---

<sup>7</sup>Baca. Al-Qur'an, semisal surat Ali Imran ayat 190-191, Al-Mujadalah ayat 11, Al-Isra' ayat 36.

<sup>8</sup>Faisal ismail, *op. cit*, hlm. 57-58.

<sup>9</sup>Uraian mengenai nilai-nilai ilaahiyah dan insaaniyah, vide, Muhaimin, et.al, *op.cit*, hlm. 315-318.

dalam pandangan Ali Saifullah menerima dua tugas budaya yang amat penting.<sup>10</sup> *Pertama*, adalah tugas menyampaikan nilai kebudayaan, yang karenanya pendidikan bersifat reflektif dalam pengertian pendidikan harus mencerminkan nilai-nilai kebudayaan yang berlaku sekarang atau saat tertentu. *Kedua*, adalah tugas mengembangkan nilai-nilai kebudayaan ke taraf yang lebih baik dan sempurna, yang karenanya pendidikan bersifat progresif dalam pengertian pendidikan harus berkembang sesuai tuntutan perkembangan kebudayaan. Dua tugas pendidikan ini mempunyai hubungan yang sangat erat, bisa dibedakan tetapi tak bisa dipisah-pisahkan. Dan dalam pandangan ST. Vembriarto :

Sekolah itu mempunyai fungsi reseptif dan direktif terhadap perkembangan masyarakat. Fungsi reseptif berarti, bahwa sekolah menerima, mempertahankan, dan memelihara nilai-nilai dan tata sosial yang ada; sekolah mempertahankan status quo. Ini adalah aspek tradisional daripada sekolah. Fungsi direktif berarti, bahwa sekolah mendorong, memberi arah, dan memimpin perkembangan masyarakat. Kedua fungsi tersebut di atas kalau dipertahankan secara menyebeloh dan ekstrim akan menuju ke *deadlock*. Sekolah akan memenuhi fungsinya dengan baik apabila kedua fungsi itu dipertahankan secara berimbang. Hal ini mungkin apabila terjadi dialog atau interaksi yang kontinu antara sekolah dengan masyarakat.<sup>11</sup>

Dua tugas tersebut akan dapat terealisasi dengan baik apabila ada kerja sama yang harmonis antara jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.<sup>12</sup> Dalam mengaktualisasikan dua tugas pendidikan itu, para pendidik pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dituntut menggalang kerja sama mengarahkan segala aspek kebudayaan pada pengembangan aspek-aspek kepribadian para peserta didik, supaya mereka mampu mengambil bagian

---

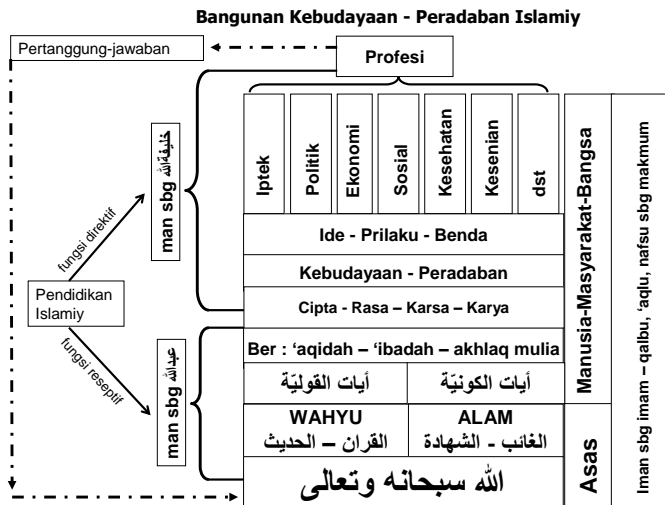
<sup>10</sup>Vide, Ali Saifullah H.A, *op. cit*, hlm. 17-19.

<sup>11</sup>St. Vembriarto, *Kapita Selekta Pendidikan*, vol.1, Paramita, Yogyakarta, 1981, hlm. 45. Pada bagian lain, St. Vembriarto berpendapat, bahwa “secara luas sekolah sebagai institusi pendidikan mempunyai lima macam fungsi penting yaitu : (a) melakukan transmisi kebudayaan, (b) melakukan pembentukan pribadi murid, (c) menjamin integrasi sosial masyarakat, (e) melakukan inovasi sosial, dan (e) melakukan praseleksi dan praalokasi tenaga kerja serta mengajarkan murid berbagai macam peranan sosial”. St. vembriarto, *op.cit*, vol.2, hlm. 100.

<sup>12</sup>Termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 13 (1) : “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”.

secara aktif dalam kehidupan sehari-hari seefektif dan seefisien mungkin. Hanya dari pribadi yang demikian sajalah bisa terealisasi sumbangan pengabdian terhadap peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Di atas telah disebutkan, bahwa Islam merupakan sumber, jiwa, asas, dan nafas dari kebudayaan Islam. Pendidikan Islam sebagai bagian dari wujud kebudayaan Islam harus mengemban dua tugas kebudayaan Islam, baik yang bersifat reflektif maupun progresif. Ini membawa konsekuensi bahwa pendidikan Islam, di mana dan kapan saja, adalah unsur mutlak dari pembinaan kepribadian umat Islam. Dalam perspektif Islam, fungsi reseptif yang harus diemban oleh pendidikan Islam dapat diidentikkan dengan mengemban tugas *habl min Allāh* (حبل من الله) yakni jalinan hubungan manusia dengan Allah, juga tugas manusia sebagai hamba Allah (عبد الله) yakni penghambaan diri manusia hanya kepada Allah; sedang fungsi direktif yang harus diemban oleh Pendidikan Islam dapat diidentikkan dengan mengemban tugas *habl min al-Nās* (حبل من الناس) yakni jalinan hubungan antar manusia beserta alam raya, juga tugas manusia sebagai *khalifah Allah di bumi* (خليفة الله في الأرض) yakni pemakmuran dunia. Dan secara lebih sederhana dapat disederhanakan dalam bagan di bawah ini.



Khusus untuk Indonesia, telah terbukti bahwa masuknya Islam di Indonesia telah menambah kekayaan kebudayaan Indonesia dengan pelbagai unsurnya seperti

filsafat, sastra, seni, dan lain-lain.<sup>13</sup> Dan telah terbukti pula bahwa umat Islam Indonesia mempunyai andil dalam merebut kemerdekaan Indonesia dari cengkeraman penjajahan Belanda dan Jepang, dan juga mempunyai andil dalam menentukan dasar negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Logis, apabila umat Islam di sini benar-benar bertekad untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekwen, maka sesuai dengan sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi adalah menjadikan pendidikan Islam sebagai pendidikan utama bagi umat Islam di seluruh satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Di sini, pendidikan Islam harus menjadi unsur mutlak terhadap pembinaan kepribadian umat Islam yang menjadi warga negara Indonesia.<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 12 ayat 1 poin a mengamanatkan bawa “(1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak : a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”. Harus diusahakan pendidikan Islam untuk tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran, Islamologi, seperti yang terjadi selama ini yang cenderung bersifat intelektualistis dan verbalistis dengan mengesampingkan komponen afektif (attitude, sikap terhadap Islam) dan mengesampingkan komponen psikomotor, ketrampilan mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam.

#### 4. Kecenderungan kebudayaan modern

Kebudayaan modern yang berkembang menjelang abad 21 masehi merupakan perkembangan lebih lanjut dari kebudayaan tahap positif.<sup>15</sup> Kebudayaan tahap positif itu pertama kali muncul di dunia Barat pada jaman pertengahan yang ditandai dengan perkembangan potensi rasional juga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendominasi, menentukan, dan mewarnai kehidupan manusia guna membebaskan manusia secara revolusioner dari pikiran mistis yang irasional dan belenggu tantangan alam semesta.

---

<sup>13</sup>Vide, H. Muh. Said, *Ilmu Pendidikan* (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 60.

<sup>14</sup>vide, Ali Saifullah H.A, *op. cit*, hlm. 50.

<sup>15</sup>Mengenai pentahapan kebudayaan, vide, Muhaimim, et. al, *op. cit*, hlm. 57-69.

Perkembangan potensi rasional di Barat itu memunculkan rasionalisme yang tidak lagi percaya bahwa hukum alam bersifat mutlak, kemudian diiringi oleh munculnya antroposentrisme/humanisme yang beranggapan bahwa kehidupan tidak berpusat pada Tuhan tetapi berpusat pada manusia, manusia menjadi penguasa realitas, manusia bisa menentukan nasibnya sendiri, manusia bisa menentukan kebenaran. Berikutnya, rasionalisme melahirkan renaissance, yaitu suatu gerakan kebangunan kembali manusia dari lingkungan mitologi dan dogma. Renaissance bercita-cita mengembalikan lagi kedaulatan manusia yang selama berabad-abad telah dirampas oleh Tuhan dan mitologi. Renaissance beranggapan bahwa kehidupan ini berpusat pada manusia bukan berpusat pada Tuhan, manusia harus menguasai alam semesta.<sup>16</sup>

Renaissance telah melahirkan revolusi paham keagamaan, bahwa pada dasarnya manusia itu merdeka, juga melahirkan revolusi ilmu pengetahuan, dan revolusi industri. Semangat untuk membebaskan manusia dari mitologi ternyata menyebabkan agnotisme terhadap agama yang pada gilirannya menimbulkan “sekularisme”.<sup>17</sup> Dan semangat revolusi ilmu pengetahuan yang tanpa semangat agama, bahkan anti agama, ternyata menimbulkan paham bahwa ilmu pengetahuan secara inheren bersifat bebas nilai (value-free).

Menjelang abad 21 Masehi, kepercayaan renaissance bahwa kemajuan kebudayaan hanya dapat terjadi apabila manusia-manusia mampu membebaskan diri dari kungkungan agama ternyata telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke dalam negara-negara Islam, yang seolah-olah tak terbendung lagi. Hanya saja karena tanpa semangat agama dan bebas nilai, maka dibalik kemajuan kebudayaan dalam era globalisasi ini sebenarnya tersimpan suatu potensi yang dapat menghancurkan martabat manusia. Perkembangan kebudayaan yang bebas nilai tanpa kendali agama secara cepat atau lambat tetapi pasti menuju pada kehancuran martabat manusia, dalam arti manusia tidak lagi berperikemanusiaan, dekadensi moral manusia. Umat manusia memang telah berhasil mengorganisasikan ekonomi,

---

<sup>16</sup>Vide, Kuntowijoyo, *Pradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, 3<sup>rd</sup> ed (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 160.

<sup>17</sup>Vide, M. Munandar Solaeman, *op.cit.*, hlm. 163. Penjelasan mengenai sekular, sekularisasi, sekularisme, materialisme, vide, Muhammad al-Naquib al-Attas, *Dilema Kaum Muslimin*, 1<sup>st</sup> ed (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986), hlm. 13-46.

menata struktur politik, merajut kesenian, mengembangkan wujud-wujud kebudayaan modern yang lain untuk kepuasan dirinya sendiri; tetapi pada saat yang sama ternyata umat manusia telah menjadi diperbudak oleh hasil rekayasanya sendiri.

Dalam masyarakat modern, manusia menghadapi mekanisme kerja. Alat-alat produksi modern dengan proses mekanisasi, otomatisasi, standarisasi ternyata menyebabkan manusia cenderung menjadi elemen yang mati dari proses produksi. Alat-alat produksi yang semula diciptakan dengan maksud membebaskan manusia dari kerja, ternyata telah menjadi alat perbudakan baru. Ia menjadi alat kepentingan pribadi/golongan yang dipaksakan kepada massa. Dan untuk mempertinggi keuntungan perusahaan, ia dituntut untuk tetap memproduksi sepanjang siang malam, yang berarti menuntut peningkatan jumlah jam kerja bagi manusia. Ia juga telah menciptakan kebutuhan-kebutuhan baru yang bersifat semu bagi manusia untuk mengkonsumsi produk-produknya.

Dalam sistem ekonomi pasar, terutama pada masyarakat kapitalis, manusia hanya menjadi elemen pasar, sehingga kualitas kerja dan kualitas kemanusiaannya ditentukan oleh kekuatan pasar. Segala sesuatu dinilai menurut nilai tukarnya di pasaran dengan bergantung pada ketentuan penawaran dan permintaan. Segala sesuatu bisa menjadi barang komoditi. Sumber daya alam dieksploitasi sedemikian rupa untuk meraup keuntungan yang maksimal, sehingga polusi tanah daratan, air/lautan, dan udara semakin meningkat; sehingga pemanasan global (*global warming*) semakin kasat mata menuju kehancuran bumi. Manusia secara fisik terutama kaum wanita juga dieksploitasi seksualnya<sup>18</sup> dalam arti luas untuk keuntungan ekonomi semata, untuk kelancaran berbisnis; wanita untuk reklame suatu produk, wanita sengaja dijajakan seksnya, wanita dijadikan suguhan pemuasan nafsu birahi rekanan bisnis guna memperlicin urusan-urusan bisnis. Di dalam sistem birokrasi, terutama pada masyarakat sosialis, manusia hanya menjadi elemen birokrasi, sehingga kualitas kerja dan kualitas kemanusiannya ditentukan oleh kekuatan aturan main birokrat. Yang seharusnya para birokrat bekerja terikat oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengabdikan diri dalam melayani masyarakat, toh ternyata

---

<sup>18</sup>Vide, Ibnu Musthafa, *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000*, 6<sup>th</sup> ed (Bandung: Al-Bayan, 1993), hlm. 9-54.

sebagian birokrat tidak konsekwen terhadap sumpah jabatannya. Sebagian birokrat melakukan penyelewengan wewenang dan kekuasaan, semisal korupsi.

Khusus untuk Indonesia, menurut F. Rahardi, korupsi itu bisa dikelompokkan menjadi tujuh pola : pola konvensional yaitu menggunakan uang negara secara langsung untuk kepentingan/keuntungan pribadi, pola kuitansi fiktif, pola komisi, pola upeti, pola menjegal order, pola perusahaan rekanan, dan pola menyalah gunaan jabatan/wewenang.<sup>19</sup> Disamping itu, surat sakti (kata belece), kolusi, uang sogok menyogok (uang semir, suap, pelicin) dan lain-lain dalam mengurus sesuatu terhadap birokrat merupakan berita-berita dari media massa atau dari mulut ke mulut yang menarik disimak; semisal mengurus penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM), melamar lowongan pekerjaan di kantor-kantor, memasukkan anak menjadi siswa baru ke sekolah favorit, mengurus pensertifikatan sebidang tanah, mengurus kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil, mengurus rapelan gaji dan atau tunjangan jabatan, mengurus turunnya proyek fisik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sampai-sampai masyarakat umum pesimistis dan menganggap semua penyelewengan itu sebagai suatu budaya bangsa, sebagai tradisi bangsa, sebagai warisan generasi pendahulu.

Kepesimisan ini seolah-olah menggiring masyarakat untuk berpendapat, bahwa mengikuti/melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan saja ternyata belum atau tidak cukup untuk berjuang mendapatkan atau mempertahankan suatu hak, bilamana tidak mengikuti pola-pola kemauan birokrat di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ironis memang, lebih-lebih usia kemerdekaan Republik Indonesia telah mencapai 69 tahun. Secara umum keberanian masyarakat menegakkan kebenaran belum maksimal guna meluruskan kembali penyelewengan birokrat, baik dengan menegurnya langsung atau menginformasikan kepada pihak yang berwajib, karena masyarakat khawatir (baca: takut resiko) urusannya dipersulit, lebih-lebih bila mengingat bahwa birokrat adalah

---

<sup>19</sup>Vide, F. Rahardi, "Tujuh Pola Korupsi di Indonesia", *Kompas*, 10-02-1990, hlm. 4, kol. 5-7; Suyatno, "Pemberantasan Korupsi Perlu Pendekatan Konseptual", *Suara Karya*, 25-10-1989, hal. 5, kol. 3-8; Abas Basori, "Hukum bagi Koruptor", *Berita Buana*, 06-02-1990; Tjuk K. Sukiadi, "Percaloan, Gejala Umum Birokrasi, Naikkan Gaji, Disiplin Bisa Ditegakkan". *Jawa Pos*, 17-09-1995.

independent variable sedangkan masyarakat adalah dependent variable. Padahal di Indonesia, tindakan pencegahan dan pemberantasan tindak penyelewengan seperti korupsi dalam segala polanya senantiasa dilaksanakan semisal dengan inspeksi mendadak (sidak), pengawasan melekat (waskat), penayangan koruptor di layar televisi, tindak lanjut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lain-lain. Semuanya tidak boleh melupakan diri, bahwa fenomena kehancuran martabat manusia semakin kasat mata : manusia teralienasi dari kerjanya sendiri, hasil kerjanya, sesamanya, dan dari masyarakatnya. Manusia dalam kebudayaan modern cenderung menderita kesepian yang amat sangat, mengalami kesendirian, merasakan kebosanan dan kesia-siaan.<sup>20</sup>

Kepesimisan masyarakat Indonesia menjadi makin lengkap dengan memperhatikan realitas hubungan kerja institusional dan oknum-oknum tiga pilar trias-politika (eksekutif, legislatif, yudikatif) selama ini yang memperlihatkan fenomena saling mendominasi, dan dengan memperhatikan realitas hubungan kerja institusional dan oknum-oknum pilar-pilar penegakan hukum (kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan, dan lain-lain) dalam menangani kasus hukum yang memperlihatkan fenomena ketidak-sinkronan dalam menegakkan keadilan. Dan terkait dengan kehidupan keberagamaan, ternyata aktualisasi ajaran Islam bidang sosial seperti pemberantasan kemiskinan, kebersihan lingkungan, pemeliharaan kelestarian lingkungan belum maksimal dan di kalangan umat Islam Indonesia juga berkembang beberapa faham dan aliran yang dikategorikan sesat.<sup>21</sup>

Dengan demikian, tantangan kebudayaan modern terhadap pendidikan Islam sebenarnya simpel bila dinyatakan, tetapi teramat prinsipil bagi kehidupan manusia, yakni kebudayaan modern itu bebas nilai (value free).

---

<sup>20</sup>Vide, Kuntowijoyo, *op. cit.*, hlm. 161-162.

<sup>21</sup>Vide, Hartono Ahmad Jais, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*, 12<sup>th</sup> ed (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006); Anshari Thayib dan M. Nadim Zuhdi, *Muslim Heboh Islam Jama'ah*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1979; Adinda Praditya, "Islam Jama'ah/LEMKARI/ LDII Sebuah Aliran Sesat Khawarij Gaya Baru", 19 Pebruari 2003, <http://alislam.or.id>, dicopy dari file Prof. Dr. H. Imam Suprayogo ketika penulis menempuh mata kuliah Teori Organisasi pada program studi MPI S3 UIN Malang semester pertama 2007-2008; Abdullah Hasal Alhadar, "Ahmadiah Telanjang Bulat di Panggung Sejarah", 01 Ramadhan 1397H (16 Agustus 1977M), <http://pakdenono.com>, diakses 17 September 2008.

Akibatnya, kebudayaan modern tumbuh dan berkembang dengan bebas secara mutlak, tanpa kendali, tanpa tujuan yang pasti. Rekayasa kebudayaan modern hanya berorientasi pada tujuan-tujuan sementara yang bersifat situasional dan kondisional sehingga tidak mengherankan manakala setiap masyarakat memiliki tujuan sendiri-sendiri dan terkadang saling bertentangan. Tak pelak lagi, dengan semangat hedonisme, kebudayaan modern menjadikan manusia merasa mampu hidup mandiri dengan menolak pengaruh kontrol dan dominasi kekuatan manapun dari luar dirinya termasuk dari Tuhan. Agama tidak lagi memiliki peran sebagai pengarah dan pengendali terhadap perkembangan kebudayaan modern, sehingga kehidupan modern pun menjadi sekular.

Kebudayaan modern yang demikian ternyata amat potensial bagi tumbuh berkembangnya situasi dan kondisi problematis bahkan krisis yang berbahaya bagi eksistensi kemanusiaan. Contoh, dekadensi moral di bidang seksual dengan keserba boleh *love affair* dalam segala manifestasinya –free seks, paid seks, biseks- telah mempercepat pertumbuhan penyakit-penyakit psikiatri berupa gangguan-gangguan mental, kecemasan, keputusasaan, iri hati, dan ketegangan-ketegangan psikosomatis lain yang bisa berakhir dengan bunuh diri atau kegilaan.<sup>22</sup>

Lebih dari itu telah disepakati oleh para ahli kesehatan sedunia bahwa *love affair* adalah sumber pertama munculnya Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), penyakit menular yang telah menimbulkan ketakutan yang mencekam terhadap umat manusia sedunia. Lebih-lebih sampai dengan hari ini belum ditemukan vaksin pencegah tangkal AIDS dan obat penyembuh penderita AIDS. Banyak manusia jatuh berguguran menjadi korban keganasan AIDS, belum lagi yang dinyatakan positif terinfeksi Human Immuno Deficiency Virus (HIV) yang kini tercatat sedikitnya berjumlah 4 juta orang di seluruh dunia. Hampir tidak ada yang bisa diperbuat oleh para penderita AIDS, kecuali hanya menunggu bantuan orang lain dan atau menunggu saat-saat kematian tiba.

Menurut Azwar Anas, Menko Kesra Kabinet Pembangunan VI, bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, dana untuk perawatan penderita AIDS sangat memberatkan dan dapat menghambat pembangunan

---

<sup>22</sup>Vide, Ibnu musthafa, *loc.cit.*

nasional. Untuk merawat seorang penderita AIDS setiap tahun menghabiskan dana kurang lebih antara Rp 2,8 juta sampai Rp 10 juta.<sup>23</sup>

Apabila dikaitkan dengan ideologi suatu bangsa, maka realitas sistem ekonomi pasar, sistem birokrasi, dan love affair yang demikian, jelas telah menghadirkan kesenjangan yang makin melebar antara ideologi yang lamban diperbaharui relevansinya dengan realitas baru kebudayaan masyarakat yang berubah secara cepat. Ini menimbulkan krisis/ketegangan dalam berinteraksi sosial. Krisis semacam itu menurut Oetojo Oesman, Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan VI, dapat berbahaya. Oetojo Oesman berpendapat, bahwa :

Masyarakat dengan realita barunya berkembang sendiri meninggalkan ideologinya, karena ideologi itu dirasakan tidak relevan lagi dengan dirinya, meskipun secara formal mereka masih berpura-pura mengakui dan menerimanya. Secara substantif ia tidak lagi menjiwai realita baru kehidupan mereka, dan oleh karena itu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi itu kehilangan maknanya sebagai pengarah atau pemandu proses pembangunan masyarakatnya. Pada saat itu pragmatisme atau ideologi lain, mungkin tanpa nama, sesungguhnya telah menggantikan ideologi resmi sebagai pengarah kehidupan masyarakat tersebut.<sup>24</sup>

Dalam menghadapi kebudayaan modern memasuki abad 21 masehi, haruslah bangsa Indonesia, teristimewa yang beragama Islam, hanya berpura-pura (baca : munafiq) dalam menerima Pancasila dengan berprilaku atas dasar pragmatisme, hedonisme, individualisme, dan lain-lain yang tidak Pancasilaistis, karena zaman telah nyata-nyata gila. Pepatah Jawa : jamané jaman édan, sing sopo wongé ora édan ora bakal keduman.

## 5. Pembaruan kurikulum

Dalam Islam, dikenal adanya konsep tauhid yang berisi ajaran bahwa Allah swt adalah pusat dari segala sesuatu (*causa prima*) dan manusia wajib mengabdikan diri secara mutlak hanya kepadaNya. Konsep tauhid ini mengandung implikasi doktrinal yang amat jauh bahwa tujuan seluruh kehidupan dan penghidupan manusia wajib diorientasikan untuk mengabdikan hanya kepadaNya. Doktrin ini merupakan

---

<sup>23</sup>“Penanggulangan AIDS di Indonesia tanggung Jawab Bersama”, *Berita Buana*, 12-12-1994, hlm. 9, kol.3-6.

<sup>24</sup>Oetojo Oesman, ed, *Pancasila Sebagai Ideologi*, 1<sup>st</sup> ed (Surabaya: Karya Anda, 1993), hlm. 11-12.

kunci dari seluruh ajaran Islam. Dengan kata lain, dalam Islam, konsep kehidupan adalah konsep yang teosentris, yakni seluruh kehidupan berpusat pada-Nya. Ternyata sistem tauhid ini mempunyai arus balik bagi manusia, bahwa iman sebagai keyakinan religius yang berakar pada pandangan teosentris selalu dikaitkan dengan amal, yakni perbuatan/tindakan manusia. Iman dan amal, keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, dalam pengertian iman wajib selalu diaktualisasikan menjadi amal. Dengan begitu, konsep tauhid itu ternyata bersifat humanistik (*humanistis teosentris*), bahwa benar menurut Islam, manusia wajib memusatkan diri mengabdikan kepadaNya, tetapi tujuannya dan manfaatnya adalah untuk kepentingan manusia sendiri, bukan untukNya.<sup>25</sup> Hubungan dengan sesama manusia menjadi membahagiakan jika diorientasikan sebagai kerja sama dan atau sebagai persaingan untuk merealisasikan sesuatu yang bernilai ketaqwaan. Hubungan dengan sesama manusia menjadi menyengsarakan, jika diorientasikan sebagai kerja sama dan atau sebagai persaingan untuk merealisasikan sesuatu yang tidak bernilai ketaqwaan.

Memperhatikan uraian di atas, maka tepat sekali apabila M. Quraish Shihab berpendapat, bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membina manusia secara pribadi dan hamba Allah swt dan sebagai khalifahNya guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan olehNya.<sup>26</sup>

Dengan demikian, yang perlu ditegaskan adalah sebenarnya Islam itu bukanlah anti modernisasi, tetapi sebaliknya Islam itu pendorong utama modernisasi. Modernisasi diartikan sebagai suatu proses aktivitas yang membawa kemajuan, perubahan dan perombakan secara asasi susunan dan corak suatu masyarakat dari statis ke dinamis, dari tradisional ke rasional, dari feodal ke kerakyatan, dan lain-lain dengan jalan merubah cara berfikir masyarakat untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi segala aparat dan tata cara secara maksimal. Modernisasi bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berkebudayaan modern, masyarakat yang mampu menciptakan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan rasionalitas untuk memaksimalkan produktivitas kerja dan menciptakan kemungkinan perbaikan cara-cara hidup. Hanya saja Islam

---

<sup>25</sup>Vide, Kuntowijoyo, *op.cit*, hlm. 228-229.

<sup>26</sup>Vide, M. Quraish shihab, *Membumikan Al-Qur'an*. 6<sup>th</sup> ed (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 172-173.

menolak dan anti modernisasi yang diidentikkan dengan atau mengandung unsur-unsur sebagai berikut :<sup>27</sup>

- a. Sekularisasi, yaitu proses penyisihan agama, wahyu, dan Tuhan dari peri kehidupan dan penghidupan manusia.
- b. Westernisasi, yaitu proses pem-Baratan dengan tanpa syarat.
- c. Kristianisasi, yaitu proses penasranian/pengkristenan.
- d. Materialisasi, yaitu proses yang mengarah pada pemusatan perhatian semata-mata pada materi.

Oleh karena Islam menolak dan anti modernisasi yang diidentikkan dengan suatu gerakan yang mengandung unsur-unsur sekularisasi, westernisasi, kristianisasi, dan materialisasi; maka pendidikan Islam memiliki peran yang amat penting dalam membina keselamatan umat Islam dari pengaruh negatif gerakan-gerakan tersebut seperti terjadinya pendangkalan aqidah, sikap hidup hedonis dan individualis.

Di samping itu, pendidikan Islam juga memiliki peran yang teramat penting dalam membebaskan manusia dari cengkeraman kebudayaan modern yang sekular, yang memporak-porandakan martabat manusia. Sebab di mana dan kapanpun, pendidikan Islam merupakan Islamisasi, yakni pembebasan manusia pertama kali dari tradisi magis, mitologis, animistis, nasional kultur, dan setelah itu dari pengawasan sekularisme terhadap pikiran dan bahasanya. Manusia Islam adalah ia yang pikiran dan bahasanya tidak dikendalikan oleh magi, mitologi, animisme, tradisi-tradisi nasional dan kulturalnya, serta sekularisme.<sup>28</sup>

Pendidikan Islam harus membebaskan manusia dari kungkungan aliran pikiran yang mendiskreditkan nilai-nilai ilaahiyah dan nilai-nilai insaaniah. Pendidikan Islam harus mampu merombak sistem-sitem kehidupan yang diklaim sebagai kebudayaan modern seperti sistem produksi teknologi, sistem sosial ekonomi, dan lain-lain yang membelenggu yang menyebabkan manusia tidak lagi mampu (takut) mengaktualisasikan dirinya sebagai makhluk yang merdeka lagi mulia. Dengan berpijak pada visi iman dan amal (*humanistis teosentris*), pendidikan Islam dengan basis

---

<sup>27</sup>Vide, Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam dan Ummatnya*, 3<sup>rd</sup> ed (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), hlm. 230-234.

<sup>28</sup>Vide, Muhammad An-Naquib al-Attas, *op. cit*, hlm. 40-41.

filsafat harus mampu mengisi “kehampaan spiritual” kebudayaan modern.

Jenis peran dan urgensi peranan pendidikan Islam dalam merespon tantangan kebudayaan modern telah nyata lagi jelas. Tetapi kini yang menjadi persoalan utama adalah bagaimana operasional/aktualisasi yang arif bijaksana dari peranan pendidikan Islam tersebut pada situasi dan kondisi di era globalisasi. Padahal menurut Emha Ainun Najib, era globalisasi adalah edisi baru dari westernisasi, baju baru milik hegemoni/keunggulan kekuatan Barat/Utara, retorika baru dari keadikuasaan yang menimpa Timur/Selatan. Sana independent variable, sini dependent variable melulu.<sup>29</sup>

Ruh dan semangat era globalisasi sebenarnya adalah materialisme beserta cabang-cabangnya seperti sekularisme, liberalisme, komunisme, hedonisme, individualisme, pragmatisme, dan lain-lain. Era globalisasi menggelinding dengan cepat sekarang ini tampak bukan diilhami, bukan disemangati, bukan dibidani, bukan digerakkan oleh konsep yang bermuara pada suatu agama seperti Islam dan lain-lain. Dengan begitu, era globalisasi sebenarnya bermuatan jahiliahisasi, goblogisasi, gombalisasi. Sehingga, pendidikan Islam memang harus gigih memperjuangkan misi pembebasan dan penyelamatan manusia dari kesekuleran kebudayaan modern.

Perubahan sosial di masa mendatang cenderung menjadi makin cepat daripada yang terjadi sekarang. Jalur pendidikan formal yang mampu merespon tantangan masyarakat menurut St. Vembriarto memiliki ciri-ciri : “(a) memberikan bekal pengetahuan umum yang kuat, luas, dan mendalam, (b) mengajarkan kepada anak bagaimana cara belajar agar mereka mampu belajar seumur hidup, (c) menanamkan sikap mandiri, disiplin, dan ketekunan hidup, dan (d) mengembangkan daya adaptabilita yang tinggi pada anak didik”.<sup>30</sup> Sejalan dengan ini, maka para pengelola jalur

---

<sup>29</sup>Vide, Emha Ainun Najib, “Bukan Globalisasi, Tapi Neo-sentralisasi”. *Surabaya Post*, 27-09-1992, hlm. 1, kol. 7-9.

<sup>30</sup>St. Vembriarto, *op.cit*, vol. 2, hlm. 101. Vide, Mochtar Buchori, *Transformasi Pendidikan*, 1<sup>st</sup>ed, IKIP Muhammadiyah Jakarta Press, 1995, “Sekolah Indonesia dan Era Globalisasi”, hlm. 140-153, dan “Prospek Pendidikan Nasional dalam Menghadapi Era Globalisasi”, hal. 198-214. Vide, Kartini Kartono, *Tinjauan Politik Sistem Pendidikan Nasional Beberapa Kritik dan Sugesti*, 1<sup>st</sup> ed, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, “Mengantisipasi Pendidikan di Era Industrialisasi dan Globalisasi”, hlm. 165-187.

pendidikan formal dituntut merespon secara tepat melalui pembaruan kurikulum dan pembelajaran agar institusi pendidikan yang dikelola relevan dengan tuntutan perkembangan kebudayaan.

Berbeda dengan pendidikan dan pelatihan (diklat), proses pada jalur pendidikan formal memiliki karakteristik : substansi pendidikan dan pembelajaran cenderung bersifat umum (tidak spesifik), memanfaatkan waktu yang relatif panjang, dan mempersiapkan peserta didik untuk mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah. Akibatnya, wajar jika dinyatakan, bahwa "...kurikulum sekolah pada umumnya tertinggal dari kemajuan masyarakat..., karena tidak mungkin kurikulum sekolah itu diperbarui setiap tahun".<sup>31</sup>

Dalam jalur pendidikan formal, kurikulum<sup>32</sup> merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan, dan merupakan pedoman bagi pengajar dalam melaksanakan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Kurikulum mendasarkan dan mencerminkan falsafah suatu bangsa. Ke arah mana dan bagaimana bentuk kehidupan bangsa itu di masa datang dapat ditentukan dan digambarkan dalam kurikulum sekarang.

Merencanakan suatu kurikulum pendidikan bukanlah pekerjaan yang ringan lagi gampang. Di samping harus mencerminkan falsafah bangsa, merencanakan kurikulum pendidikan itu harus sesuai dengan tuntutan sosial (*social demand*), harus sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga harus sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja (*man power*). Padahal ketiga hal ini saling terkait dan berubah dengan cepat secepat perubahan jaman.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 (19): "Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu".

<sup>33</sup>Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab X Pasal 36 (1) : "Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional", (2) : "Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi

Jika mencermati perkembangan suatu masyarakat, maka diperoleh berbagai fenomena peningkatan dan perluasan pengetahuan dan kemampuan mengendalikan lingkungan dari waktu ke waktu dari satu generasi ke generasi penerusnya. Contoh, dulu manusia belum dapat mengendalikan jarak kelahiran anak, sekarang sudah tahu dan bisa membuktikan; dulu belum dapat mengendalikan kecepatan dan jumlah produksi pangan, sekarang sudah bisa membuktikan; dan lain-lain. Dalam konteks dinamika masyarakat seperti ini, jalur pendidikan formal dituntut mampu menjadi media pewarisan agar dinamika tersebut dididikkan dan dibelajarkan terhadap para pelajar sebagai generasi penerus. Fenomena seperti ini membawa konsekuensi terhadap pemikiran mengenai kurikulum untuk menambah daftar mata pelajaran atau tidak. Terkait dengan ini, Sanapiah Faisal mencatat, bahwa "..., lembaga sekolah itu sendiri, dengan berbagai cara, boleh dikata ikut mentolerir munculnya mata pelajaran – mata pelajaran tambahan. Ada yang diintegrasikan penyajiannya melalui mata pelajaran – mata pelajaran yang sudah ada. Ada yang diprogramkan melalui kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler".<sup>34</sup> Terkait dengan ini, pendapat Sayling Wen, bahwa "pendidikan seharusnya mengajari Anda bagaimana caranya belajar dan bukan memberikan instruksi tentang suatu pelajaran tertentu",<sup>35</sup> patut untuk dicermati agar beban studi para pelajar tidak melampaui batas kemampuannya.

Kurikulum pendidikan senantiasa bersifat dinamis, menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan supaya dapat memantapkan pembelajaran dan hasil belajar. Itulah sebabnya harus diadakan perbaikan kurikulum pendidikan. Akan tetapi perbaikan kurikulum itupun tidak selamanya dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas baik, mengingat bahwa kurikulum itu bersifat hipotesis yang realisasinya

---

daerah, dan peserta didik", (3) : "Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan : a. peningkatan iman dan taqwa; b. peningkatan akhlaq mulia; c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d. keragaman potensi daerah dan lingkungan; e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f. tuntutan dunia kerja; g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h. agama; i. Dinamika perkembangan global; dan j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan".

<sup>34</sup>Sanapiah Faisal, *Sosiologi Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, t.t), hlm. 129.

<sup>35</sup>Sayling Wen, *Future of Educatin (Masa Depan Pendidikan)*, terjemahan Arvin Saputra, (Bata: Lucky Publishers, 2003), hlm. 78.

banyak bergantung pada faktor pendidik. Meski demikian, tetap diperlukan usaha-usaha memperbaiki kurikulum itu, agar tersedia alat pendidikan yang dianggap ampuh untuk mencapai tujuan pendidikan.

Secara umum, pengembangan kurikulum menurut S. Nasution dapat dilakukan dengan berpegang pada empat asas: filosofis, psikologis (psikologi belajar dan psikologi anak), sosiologis, organisatoris.<sup>36</sup> Pengembangan kurikulum pendidikan harus dijiwai dan dilandasi oleh banyak prinsip yang menurut Sudirman N terdiri dari : prinsip orientasi pada tujuan; prinsip relevansi; prinsip efisiensi; prinsip keefektifan; prinsip fleksibilitas; prinsip integritas; prinsip kontinuitas; prinsip sinkronitas; prinsip obyektifitas; prinsip demokrasi.<sup>37</sup> Dengan memperhatikan asas-asas dan prinsip-prinsip ini dalam merencanakan dan mengembangkan kurikulum pendidikan, setidaknya-tidaknya kemantapan yang relatif untuk sebuah kurikulum dapat dicapai. Kendatipun disadari bahwa untuk dapat menerapkannya dibutuhkan keberanian dan kenekadan dari seluruh jajaran pengelola pendidikan formal baik yang ada dalam struktur pemerintah pusat maupun daerah, lebih-lebih terkait dengan tugas pelestarian nilai-nilai luhur Pancasila yang secara realitas harus melawan arus globalisasi yang kian deras menerpa dari berbagai penjuru.

## Penutup

Di Indonesia dalam era reformasi, sejalan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 (1) “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”, telah dikembangkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) untuk

---

<sup>36</sup>S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, 6<sup>th</sup> ed, Jemmars, Bandung, 1982, hlm. 21. Asas filosofis (filsafat dan tujuan pendidikan) : mendidik peserta didik menjadi manusia yang baik bagi masyarakatnya sesuai dengan tuntutan tata nilai yang dianut. Peserta didik senantiasa hidup dalam masyarakatnya dan harus memenuhi tugas-tugas tertentu dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kedudukan sebagai warga masyarakat masa kini maupun masa mendatang.

<sup>37</sup>Untuk mendalami pengertian masing-masing prinsip itu, vide, Sudirman N, et.al, *Ilmu Pendidikan*, 2<sup>nd</sup> ed (Bandung: Remaja Karya, 1988), hlm. 30-31.

madrasah dan sekolah yang diharapkan dapat lebih meningkatkan mutu lulusan sekolah/madrasah. Dinyatakan oleh E. Mulyasa, bahwa:

..., berbagai pihak menganalisis dan melihat perlunya diterapkan kurikulum berbasis kompetensi (competency based curriculum) yang dapat membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan sesuai dengan tuntutan jaman dan reformasi yang sedang bergulir, guna menjawab tantangan arus globalisasi, berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan kesejahteraan sosial, lentur, dan adaptif terhadap berbagai perubahan.<sup>38</sup>

Kemudian dikembangkan kosep kerangka dasar dan struktur kurikulum secara nasional sebagai pijakan bagi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menetapkan panduan yang dijadikan pedoman penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)<sup>39</sup>, yakni kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan.<sup>40</sup> Berarti, jajaran pendidik/pengajar (guru) secara keseluruhan dituntut kerja keras sekaligus kerja sama dengan jajaran stakeholders mengembangkan kurikulum (perbaikan atau perubahan)<sup>41</sup> pada satuan pendidikan tempat mengabdikan diri menjalani profesi sebagai pengajar. Oemar Hamalik menegaskan, bahwa

---

<sup>38</sup>E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, 2<sup>nd</sup> ed (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. vi.

<sup>39</sup>Vide, E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*, 1<sup>st</sup> ed (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008)

<sup>40</sup>Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), Bab I pasal 1 ayat 15 : “Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan”, Bab III pasal 6 (1) : “Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas : a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlaq mulia; b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; kelompok mata pelajaran estetika; e. kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan”, Pasal 6 (4) : “Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran mempengaruhi pemahaman dan/atau penghayatan peserta didik”.

<sup>41</sup>Perubahan kurikulum biasanya hanya mengenai satu atau beberapa aspek dari kurikulum. Perubahan kurikulum (pembaharuan, inovasi kurikulum) mengenai perubahan dasar-dasarnya, baik mengenai tujuan maupun alat-alat atau cara-cara untuk mencapai tujuan itu. S. Nasution, *op.cit*, hlm. 210. Vide, Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, 2<sup>nd</sup> ed, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007)

“sesungguhnya guru merupakan seorang *key person* yang paling mengetahui tentang kebutuhan kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan murid. Karena itu sewajarnya apabila dia turut aktif dalam pembinaan kurikulum di sekolahnya”.<sup>42</sup>

Terkait dengan pemberlakuan kurikulum 2013, setiap guru yang mengajar di setiap madrasah dan sekolah, baik Sekolah Kategori Mandiri (SKM) maupun Sekolah Standar Nasional (SSN) perlu terlebih dulu melakukan analisis materi pelajaran untuk menentukan sifat materi yang esensial dan non-esensial sebagai diberlakukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum.<sup>43</sup> Suatu materi pelajaran dikatakan memiliki konsep esensial bila memenuhi unsur kriteria: konsep dasar, konsep yang menjadi dasar untuk konsep berikut, konsep yang berguna untuk aplikasi, konsep yang sering muncul pada Ujian Akhir. Materi pelajaran yang diidentifikasi sebagai konsep-konsep yang esensial diprioritaskan untuk diberikan secara tatap muka, sedangkan materi-materi yang non-esensial, kegiatan pembelajarannya dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan mandiri.<sup>44</sup> Dari sini menjadi semakin rasional manakala dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 57 tahun 2012

---

<sup>42</sup>Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, 13th ed, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hlm. 128.

<sup>43</sup>Perhatikan juga, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan; Peraturan Menteri Agama nomor 000912 Tahun 2013 Tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab.

<sup>44</sup>Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Model Penyelenggaraan Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional*, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas (Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2008)

tenatang Uji Kompetensi Guru (UKG) sebagai syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional guru pada Pasal 5 (3) menuntut guru menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu guru; juga menguasai metodologi keilmuan sesuai bidang tugas yang dibebankan kepada guru.

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Maman. *Ilmu Sosial Dasar*, 1<sup>st</sup> ed. Calvary, Bandung, 1987.
- Al-Attas, Muhammad al-Naquib. *Dilema Kaum Muslimin*, 1<sup>st</sup> ed, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1986.
- Alhadar, Abdullah Hasal. “Ahmadiyah Telanjang Bulat di Panggung Sejarah”, 01 Ramadhan 1397H (16 Agustus 1977M), <http://pakdenono.com>, diakses 17 September 2008.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Agama dan Kebudayaan*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1980.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Wawasan Islam Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam dan Ummatnya*, 3<sup>rd</sup> ed, CV. Rajawali, Jakarta, 1991.
- Basori, Abas. “Hukum bagi Koruptor”, *Berita Buana*, 06-02-1990.
- Buchori, Mochtar. *Transformasi Pendidikan*, 1<sup>st</sup>ed, IKIP Muhammadiyah Jakarta Press, 1995.
- Daulay, Haidar Putra. *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah*, 1<sup>st</sup> ed, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Model Penyelenggaraan Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional*, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, 2008.
- Faisal, Sanapiah. *Sosiologi Pendidikan*, Usaha Nasional, Surabaya, n.d.
- Gazalba, Sidi. *Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu*, vol. 2, 3<sup>rd</sup> ed, Pustaka Antara, Jakarta, 1967.
- Hamalik, Oemar. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, 2<sup>nd</sup> ed, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
- Hamalik, Oemar. *Proses Belajar Mengajar*, 13th ed, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2011.

- Ismail, Faisal. *Agama dan Kebudayaan*, 1<sup>st</sup> ed, PT Al-Maarif, Bandung, 1982.
- Jais, Hartono Ahmad. *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*, 12<sup>th</sup> ed, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2006.
- Kartono, Kartini. *Tinjauan Politik Sistem Pendidikan Nasional Beberapa Kritik dan Sugesti*, 1<sup>st</sup> ed, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, n.d.
- Koentjoroningrat, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, 3<sup>rd</sup> ed, PT. Gramedia, Jakarta, 1976.
- Kuntowijoyo, *Pradigma Islam interpretasi untuk Aksi*, 3<sup>rd</sup> ed, Mizan, Bandung, 1991.
- Maksum, *Madrasah Sejarah & Perkembangannya*, 1<sup>st</sup> ed, PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.
- Muhaimin, et.al, *Dimensi-Dimensi Studi Islam*, 1<sup>st</sup> ed. Karya Abditama, Surabaya, 1994.
- Mulyasa, E. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, 2<sup>nd</sup> ed, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003.
- Mulyasa, E. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*, 1<sup>st</sup> ed, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Musthafa, Ibnu. *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000*, 6<sup>th</sup> ed, Al-Bayan, Bandung, 1993.
- Najib, Emha Ainun. "Bukan Globalisasi, Tapi Neo-sentralisasi". *Surabaya Post*, 27-09-1992 hal.1, kol. 7-9.
- Nasution, S. *Asas-Asas Kurikulum*, 6<sup>th</sup> ed, Jemmars, Bandung, 1982.
- Oesman, Oetojo. ed, *Pancasila Sebagai Ideologi*, 1<sup>st</sup> ed, Karya Anda, Surabaya, 1993.
- "Penanggulangan AIDS di Indonesia tanggung Jawab Bersama", *Berita Buana*, 12-12-1994, hal.9, kol.3-6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 57 tahun 2013 tentang Uji Kompetensi Guru.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum.
- Peraturan Menteri Agama nomor 000912 Tahun 2013 Tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab.
- Praditya, Adinda. “Islam Jama’ah/LEMKARI/ LDII Sebuah Aliran Sesat Khawarij Gaya Baru”, 19 Pebruari 2003, <http://alislam.or.id>, dicopy dari file Prof. Dr. H. Imam Suprayogo ketika penulis menempuh mata kuliah Teori Organisasi pada program studi MPI S3 UIN Malang semester pertama 2007-2008,
- Rahardi, F. “Tujuh Pola Korupsi di Indonesia”, *Kompas*, 10-02-1990,hal. 4, kol. 5-7.
- Said, H. Muh. *Ilmu Pendidikan*, Alumni, Bandung, 1985.
- Saifullah, Ali. *Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982.

- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. 6<sup>th</sup> ed, Mizan, Bandung, 1994.
- Sudirman N, et.al, *Ilmu Pendidikan*, 2<sup>nd</sup> ed, Remaja Karya, Bandung, 1988.
- Sukiadi, Tjuk K. "Percaloan, Gejala Umum Birokrasi, Naikkan Gaji, Disiplin Bisa Ditegakkan". *Jawa Pos*, 17-09-1995.
- Suyatno, "Pemberantasan Korupsi Perlu Pendekatan Konseptual", *Suara Karya*, 25-10-1989, hal. 5, kol. 3-8.
- Thayib, Anshari. dan M. Nadim Zuhdi. *Muslim Heboh Islam Jama'ah*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1979.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Vembriarto, St. *Kapita Selektta Pendidikat*, vol.2, Andi Offset, Yogyakarta, 1989.
- Vembriarto, St. *Kapita Selektta Pendidikan*, vol.1, Paramita, Yogyakarta, 1981.
- Wen, Sayling. *Future of Educatin (Masa Depan Pendidikan)*, terjemahan Arvin Saputra, Lucky Publishers, Batam, 2003.